

Implementasi program dinas sosial kota bogor dalam penanganan anak jalanan

Yusuf Hamdani^{1*}, Dadan Kurniansyah²

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

*Email: yusufhamdani1999@gamil.com

Abstrak

Anak jalanan merupakan salah satu masalah yang membuat tatanan kota menjadi tidak indah dan bersih. Vandalisme, pengemis, dan premanisme tumbuh dengan subur layaknya taman buah di jalanan kota-kota metropolitan. Tak lain pula hal ini menimpa Kota Bogor. Dinas Sosial Kota bogor pun sudah mengerahkan segala strategi dan program yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan anak jalanan ini. Peneliti menggunakan teori efektivitas dari Steers (1977) dalam Sutrisno (2010 :148) mengutarakan bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperlihatkan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu : optimalisasi tujuan, perspektif sistem, tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dari Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Bogor dinilai kurang berhasil karena kurangnya kontroling dari pihak dinas selepas pelaksanaan pemberdayaan.

Kata Kunci: Anak jalanan; efektivitas

The effectiveness of the implementation of the bogor city social service program in handling street children

Abstract

Street children are one of the problems that make the city order not beautiful and clean, vandalism, beggars, and thuggery thrive like fruit gardens on the streets of metropolitan cities. None other than this happened to the City of Bogor. Bogor City Social Service has also deployed all strategies and programs that are considered capable of solving the problems of street children. Researchers use the theory of effectiveness from Steers (1977) in Sutrisno (2010: 148) expressing that the best thing in researching effectiveness is to simultaneously show three interrelated concepts, namely: optimization of objectives, system perspectives, pressure on the aspects of human behavior in the organizational structur. In this study, the authors used a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the strategy of the Social Service in dealing with street children in the city of Bogor was considered less successful because of the lack of control from the agency after the implementation of empowerment.

Keywords: *street children; effectiveness*

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah anak jalanan di Indonesia bermula pada tahun 1998, hal itu disebabkan karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan masa Soeharto. Masa transisi ini juga berdampak pada perubahan secara ekonomi masyarakat yang kemudian menimbulkan begitu banyak permasalahan sosial yang bermunculan. Abu Huraera (2006: 78) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab munculnya anak jalanan, yaitu:

Orang tua yang mendorong anaknya untuk bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga;
Kasus kekerasan dan perlakuan yang salah terhadap anak oleh orang tua yang semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan;

Anak yang terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah;

Semakin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah yang mahal;

Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk dan melakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan;
Anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru; dan

Anak jalanan yang menjadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang banyak beraktivitas di Kota Bogor menjadi permasalahan serius untuk ditangani oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial Kota Bogor. Hal itu karena berdasarkan data sementara yang peneliti dapgat pada 2019 lalu, dari 20.000 orang yang masuk golongan PMKS, 60% berasal dari anak jalanan dan orang terlarang dari luar Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Sosial memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang menangani berbagai permasalahan sosial di Kota Bogor seperti anak jalanan. Sesuai dengan Perwali Kota Bogor Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial menyebutkan bahwa "Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial". Keberhasilan Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan dapat dilihat dari tata kelola sumber daya manusia (SDM) yang berada di dinas sosial.

Kemudian indikator keberhasilan lainnya yaitu efektivitas dari program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dalam menangani permasalahan anak jalanan yang berada di Kota Bogor. Strategi tersebut dapat berupa kebijakan atau program yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Bogor dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan dasar di bidang sosial. Dengan fungsi tersebut, seharusnya Dinas Sosial Kota Bogor dapat memanfaatkan sumber daya manusia dinas sosial dengan maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk meringkas serta menggambarkan kondisi, situasi dan fenomena yang menjadi realitas sosial dalam masyarakat, fokusnya adalah untuk mengangkat ciri, karakter, sifat, model atau gambaran yang lebih spesifik tentang objek penelitian yaitu Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Bogor (Nazir, 2003).

Data penelitian yang diolah adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari informan yang dipilih berdasarkan teknik *Snowball Sampling* dan observasi serta wawancara dengan pertimbangan bahwa informan dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian. Teknik ini menelusuri keterkaitan antar pihak yang terlibat dan apabila informasi sudah didapat maka pengumpulan informasi selesai. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis menggunakan beberapa langkah, yaitu 1) Pengumpulan data mentah, 2) Koding, 3) Membuat konsep, 4) Membuat kategori, 5) Membuat hipotesis, dan 6) Triangulasi.

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019, yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Bogor. Dengan subyek penelitian Kasi Rehabilitas Tuna Sosial dan PMKS. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu peneliti melihat dan mengamati secara langsung, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Azrin Syamsudin sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Bogor mengatakan, Pemerintah Kota Bogor kesulitan menertibkan para PMKS tersebut yang berkeliaran di jalanan. Menurut Bapak Azrin Syamsudin hal itu dikarenakan Kota Bogor memiliki fasilitas taman yang banyak dengan suasana yang asri, sehingga para anak jalanan merasa nyaman untuk hidup di jalan. Selain itu, Kota Bogor juga merupakan kota berkembang sehingga mudah bagi anak jalanan untuk mendapatkan uang di jalan. Namun, Pemerintah Kota hanya bisa mengakomodasi PMKS yang berasal dari Kota Bogor saja. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, para anak jalanan yang diluar Kota Bogor tidak mungkin diakomodasi juga karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Bogor, namun bukan berarti anak jalanan yang berasal dari luar Kota Bogor tidak ditangani. Dinas Sosial melakukan penanganan untuk anak jalanan yang bukan berasal dari Kota Bogor dengan menghubungi Dinas Sosial kota asal si anak jalanan tersebut, setelah itu akan dikembalikan ke daerah nya masing-masing. Selain itu, banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Bogor ini karena disebabkan belum adanya aturan yang mengatur dengan tegas mengenai anak jalanan. Padahal pemerintah Kota Bogor telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Namun, masih saja para anak jalanan tersebut selalu kembali lagi ke jalanan untuk memulai kembali aksinya. Menurut Bapak Azrin selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, penanganan PMKS di jalanan belum terpadu dan maksimal. Dibutuhkan sinergi seluruh dinas terkait. Saat ini Dinas Sosial Kota Bogor sudah bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor untuk melakukan penjarangan PMKS di jalanan.

Merujuk pada hasil wawancara yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan mengukur sejauh mana efektivitas program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dalam upaya menangani peningkatan dan aktivitas anak jalanan atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menggunakan teori efektivitas dari Steers (dalam Strisno, 2010: 133) yang memiliki 3 indikator yaitu 1) Optimalisasi tujuan, 2) Perspektif sistem, dan 3) Tekanan pada segi perilaku manusia,. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

Optimalisasi tujuan

Dalam indikator optimalisasi program menyebutkan bahwa sebuah program dapat dikatakan efektif jika program dapat mencapai tujuannya dalam program tersebut atau dalam kata lain sejauh mana program tersebut tercapai tujuannya.

Jika kita melihat dan coba menghubungkan anatara indikator optimalisasi program dengan program upaya penanganan anak jzzzalanan Dinas Sosial Kota Bogor maka kita mendapat hasil bahwa program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Bogor sudah efektif, hal itu karena menurut data yang diberikan oleh Bapak Kurnia sebagai Staff pengelola rehabilitas sosial mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi anak jalanan kota Bogor di Kota Bogor itu sendiri, sesuai dengan tujuan dari dinas Sosial kota Bogor bagian pengelola rehabilitas sosial yaitu menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan.

Perspektif sistem

Dalam perspektif sistem fokus perhatiannya lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling berhubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam sistem ini mencakup komponen utama yaitu input, output dan proses. Sebagai sebuah sistem, suatu instansi menerima input dari lingkungan masyarakat kemudian memprosesnya dan kemudian memberikan output pada lingkungan masyarakat serta bagaimana proses yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam melaksanakan input yang telah diterima serta bagaimana proses output yang dikeluarkan. Berikut penjelasan komponen utamanya.

Input

Permasalahan mengenai anak jalanan memang selalu ada di setiap kota manapun termasuk Kota Bogor. Permasalahan anak jalanan memang membuat masyarakat menjadi risih akibat anak jalanan yang tersebar di beberapa titik yang ada di Kota Bogor. Bagi beberapa masyarakat, anak jalanan terkesan mengganggu kenyamanan karena melakukan aktivitas jalanan yang berupa mengemis dan mengamen

yang cenderung memaksa. Peneliti juga mewawancarai salah satu informan yang merupakan orang Kota Bogor asli, informan tersebut merasa dengan adanya anak jalanan yang berada di titik-titik tertentu memang dirasa sangat mengganggu para pengguna jalan. Hal tersebut dikarenakan beberapa anak jalanan cenderung memaksa untuk diberi uang oleh para pengguna jalan ketika anak jalanan tersebut sedang mengemis dan mengamen. Sebenarnya dalam mengatasi permasalahan anak jalanan memang sudah kewajiban negara melalui Kementerian Sosial yang mengatur mengenai permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Tetapi daerah memiliki kewajiban pula dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Dengan demikian hal tersebut membuat masyarakat mengadakan keluhan mereka kepada dinas terkait yang menangani permasalahan anak jalanan. Masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Bogor yaitu dinas harus berupaya secara maksimal dalam penanganan anak jalanan yang tersebar di wilayah Kota Bogor. Selain itu masyarakat juga memberikan masukan agar Dinas Sosial dapat lebih memberdayakan anak jalanan sehingga anak jalanan tersebut tidak kembali beraktivitas di jalanan untuk meminta-minta dan mengamen.

Output

Setelah mendapat masukan dari masyarakat, Dinas Sosial Kota Bogor mengeluarkan output yang berupa program dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan anak jalanan. Program yang dikeluarkan oleh dinas yaitu program penjangkauan, pemberdayaan dan penjaringan. Pada tahap pertama, Dinas Sosial Kota Bogor melakukan penjangkauan. Pada tahap penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan cara menjangkau anak jalanan yang berada di jalanan, ditelusuri di berbagai tempat yang menjadi pusat anak jalanan untuk mengemis, mengamen, berdagang, dan lain sebagainya. Pada tahap pemberdayaan, Dinas Sosial Kota Bogor melakukan pemberdayaan terhadap anak jalanan yang telah terjangkau. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bogor sendiri seperti melakukan pelatihan dan pembinaan. Pada tahap penjaringan, Dinas Sosial Kota Bogor melakukan penjaringan terhadap anak jalanan yang berada di Kota Bogor. Penjaringan ini biasanya dilakukan dengan melibatkan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Bogor.

Proses

Dalam pelaksanaan proses masukan (input) biasanya masyarakat dapat memberi keluhan atau saran kepada Dinas Sosial yang kemudian keluhan atau saran tersebut diproses oleh Dinas Sosial. Keluhan atau saran tersebut diproses dengan membuat suatu program dan mengeluarkan kebijakan terkait penyelesaian permasalahan anak jalanan. Program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Bogor yaitu penjangkauan, pemberdayaan dan penjaringan. Dalam proses pelaksanaan program yang pertama yaitu penjangkauan Dinas Sosial Kota Bogor melakukan penjangkauan sebanyak 4 kali dalam seminggu. Dinas Sosial Kota Bogor sendiri mengatakan bahwa mereka hanya menjangkau anak jalanan yang berusia di bawah 17 tahun, jadi jika anak jalanan tersebut berada di atas 17 tahun maka Dinas Sosial Kota Bogor tidak memiliki kewajiban untuk menjangkau anak jalanan tersebut. Untuk melakukan penjangkauan Dinas Sosial sendiri memiliki Satgas (Satuan Tugas) yang akan melakukan penjangkauan secara langsung atau yang terjun langsung ke lapangan.

Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan sosialisasi pada masyarakat baik secara verbal maupun non-verbal. Sosialisasi secara verbal dilakukan dengan penyuluhan serta bimbingan sosial, sedangkan sosialisasi non-verbal dilakukan dengan cara pemasangan baliho di lokasi-lokasi tertentu seperti di Jambu Dua, Ekalokasari dan lampu merah. Sementara dalam proses pelaksanaan pemberdayaan, Dinas Sosial Kota Bogor memberikan pembinaan dan pelatihan. Dalam pelatihan yang biasanya dilakukan yaitu dengan melatih anak jalanan untuk menyablon, alat penyablonan sendiri difasilitasi oleh Dinas Sosial dan setiap anak jalanan yang diberdayakan masing-masing memperoleh satu alat penyablon. Sementara dalam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan melakukan penguatan diri kepada anak jalanan, selain itu dilakukan pula konseling dengan menghadirkan psikolog dari Bandung serta pembinaan keagamaan yang melibatkan instansi terkait. Dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial biasanya memberi wejangan kepada anak jalanan untuk memperingati bahaya narkoba dan menghindari penggunaan narkoba.

Selanjutnya Dinas Sosial Kota Bogor dalam pelaksanaan proses penjaringan dilakukan dengan menjaring anak jalanan yang berada di wilayah Kota Bogor. Penjaringan ini biasanya dilakukan dengan melibatkan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Bogor. Penjaringan dilakukan secara dadakan

oleh Dinas Sosial dan Satpol PP. Dinas Sosial sendiri tidak memiliki wewenang melakukan penjangkauan jika tidak didampingi oleh petugas keamanan (Satpol PP) setempat. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan kebijakan tersebut sudah mulai terlaksana. Dinas Sosial berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dari adanya peraturan daerah tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Sosial yang berupa penyuluhan secara verbal maupun non-verbal.

Dalam pengimplementasian program yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dirasa sudah cukup baik karena program-program tersebut sudah terlaksana sesuai dengan tujuan dari Dinas Sosial itu sendiri. Walaupun anak jalanan masih dapat ditemukan di sekitar Kota Bogor, namun anak jalanan tersebut bukan anak jalanan yang berasal dari Kota Bogor melainkan anak jalanan yang berasal dari luar Kota Bogor dan berasal dari Kabupaten Bogor. Hal tersebut merupakan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari Dinas Sosial. Memang pada dasarnya program yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bogor hanya fokus pada anak jalanan yang ada di Kota Bogor dan anak jalanan tersebut memang berdomisili di Kota Bogor. Tentunya sangat disayangkan jika penanganan anak jalanan hanya berfokus pada anak jalanan yang berdomisili di Kota Bogor saja. Oleh karena itu, masih dapat ditemukan anak jalanan yang tersebar di beberapa titik di Kota Bogor akibat dari program yang hanya fokus pada anak jalanan di Kota Bogor saja. Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi berburuk sangka pada Dinas Sosial karena masih terdapat anak jalanan yang berkeliaran di Kota Bogor. Tentunya bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui fokus program ini akan dapat menilai bahwa kinerja dinas belum cukup berjalan dengan baik. Walaupun demikian sejauh ini program tersebut sudah cukup terlaksana dengan baik.

Tekanan pada segi perilaku manusia

Tekanan pada perilaku, dalam model ini, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi. Hubungan ini meliputi hubungan antara program yang dijalankan oleh organisasi dan tujuan yang ingin dicapai dari program yang dijalankan. Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar. Perilaku manusia dalam organisasi digunakan karena atas dasar realitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Karena faktor manusia itulah suatu organisasi dapat efektif atau bias menjadi tidak efektif.

Tekanan perilaku manusia yang berada pada lingkungan Dinas Sosial Kota Bogor dapat terlihat jelas saat para aparatur sipil negara (ASN) Dinas Sosial Kota Bogor menjalankan program yang dilaksanakan. Dalam program yang dilakukan untuk mengatasi masalah anak jalanan, yaitu berupa penjangkauan, pemberdayaan atau pembinaan, dan penjangkauan perilaku pegawai Dinas dalam pelaksanaan ketiga program tersebut, relatif homogen. Artinya, program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dalam menangani masalah sosial sudah sesuai dengan tujuan dari Dinas Sosial Kota Bogor. Tertulis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Bogor, yaitu meningkatnya pelayanan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini berkaitan dengan masalah anak jalanan. Pembagian tugas tersebut dilakukan melalui langkah-langkah yaitu pertama penjangkauan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor. Kemudian, apabila para anak jalanan yang telah dijangkau masih terus beraktivitas/tidak mengindahkan peringatan dari Dinas Sosial, maka tugas selanjutnya diserahkan pada Satpol PP. Satpol PP sebagai pelaksana penegak peraturan daerah berhak melakukan penjangkauan pada anak jalanan yang terbukti tidak mengindahkan peringatan dari Dinas Sosial.

Pencapaian yang dituju dapat dilihat melalui pencapaian program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor, khususnya penanganan anak jalanan yang berhasil dilaksanakan. Dinas Sosial Kota Bogor rutin menjalankan program penjangkauan yang dilaksanakan di tempat-tempat strategis berkumpulnya anak jalanan dalam melakukan aktivitasnya. Bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Dinas Sosial Kota Bogor saling bersinergi dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan proses penjangkauan dan penjangkauan. Pencapaian tujuan Dinas Sosial sendiri merujuk pada persentase jumlah anak jalanan yang berdaya. Maksud berdaya disini yaitu anak jalanan

mampu mengembangkan potensi yang dimiliki mereka untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Melalui kegiatan pemberdayaan atau pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bogor, maka para anak jalanan yang sudah dijangkau dan dijaring diberikan pelatihan keterampilan dan rohani. Kegiatan ini bertujuan agar mereka menjadi manusia yang dapat memanfaatkan hal-hal yang positif dan tidak mengganggu ketertiban umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

SIMPULAN

Efektivitas implementasi dari program penanganan anak jalanan di Kota Bogor oleh Dinas Sosial Kota Bogor bila dilihat dari beberapa sisi adalah:

Dalam sisi optimalisasi tujuan Dinas Sosial Kota Bogor sudah dirasa cukup efektif penyelenggaraan program yang dilakukannya. Hal itu karena menurut data yang diberikan oleh Bapak Kurnia sebagai Staff pengelola rehabilitas sosial mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi anak kota Bogor yang berada dijalanan Kota Bogor itu sendiri;

Dalam perspektif sistem terdapat tiga komponen utama yaitu input, output dan proses:

Masukan yang diberikan masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Bogor yaitu dinas harus berupaya secara maksimal dalam penanganan anak jalanan yang tersebar di wilayah Kota Bogor. Selain itu masyarakat juga memberikan masukan agar Dinas Sosial dapat lebih memberdayakan anak jalanan sehingga anak jalanan tersebut tidak kembali beraktivitas di jalanan untuk meminta-minta dan mengamen;

Dinas Sosial Kota Bogor mengeluarkan output yang berupa program dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan anak jalanan. Program yang dikeluarkan oleh Dinas yaitu program penjangkauan, pemberdayaan dan penjaringan. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh PemDa Kota Bogor sendiri yaitu mengeluarkan PerDa Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur mengenai permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); dan

Keluhan atau saran tersebut diproses dengan membuat suatu program dan mengeluarkan kebijakan terkait penyelesaian permasalahan anak jalanan. Proses pelaksanaan program yang dibuat oleh Dinas Sosial sudah cukup berjalan dengan baik dan dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Kemudian bila dilihat dari sisi tekanan pada segi perilaku manusia pada Dinas Sosial Kota Bogor relatif homogen. Artinya, apa yang diinginkan Dinas Sosial Kota Bogor dalam hal ini tujuan atau misi Dinas dapat dilaksanakan secara nyata oleh para pelaksana tugas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bogor dalam menangani permasalahan masyarakat Kota Bogor yang bermasalah kesejahteraan sosial. Khususnya program penanganan anak jalanan yang meliputi kegiatan penjangkauan, pemberdayaan/pembinaan, dan penjaringan.

DAFTAR PUSTAKA

Ainun Buroroh, Novia, (2016). *Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi*. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/5209/1/12410075.pdf> [20 Oktober 2019]

Dinas Sosial Kota Bogor, (2018), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018. [Online]. Available: <https://dinsos.kotabogor.go.id/welcome/dokumen> [10 Desember 2019]

Permasalahan anak jalanan, (2017) [Online]. Available: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/454/351>

Permasalahan anak jalanan Kabupaten Bogor, (2018) [Online]. Available: <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01323234/punya-banyak-taman-bogor-jadi-sarang-gelandangan-dan-anak-jalanan>